

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, UKI Press, Jakarta, 2023.
- Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- , *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- , *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Ketiga, Rafika Aditama, Bandung, 2015.
- Handoko W, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realitas*, Cetakan Pertama, PT. Roda Publika Kreasi, Bekasi, 2019.
- H Salim HS dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- H Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- , *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Suplemen Jabatan Notaris*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2014.

- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, “*Ke Notaris*”, Raih Asa Sukses, Bogor, 2009.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Ajar, Yogyakarta, 2017.
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, CV. Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.
- , *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cakrawala Jogjakarta, Yogyakarta, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

## **TESIS dan DISERTASI**

Mardjoni dan Laily Nur Azizah. *Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dikaitkan Dengan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Tesis. Universitas Narotama Surabaya, 2019.

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

## **JURNAL, MAKALAH, dan KARYA ILMIAH LAINNYA**

Agustin Rifiana, Yetniwati Yetniwati, dan Diana Amir, “*Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas Di Era Globalisasi*”, *Wajah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Oktober 2022.

Fransiscus Joel Robert Simarmata, “*Pelaksanaan Sanksi Bagi Pejabat Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*”, *Lex Et Societatis*, 2020.

Latifah, “*Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*”, *Officium Notarium*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

M. Jamil, “*Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah*”, *Supremasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, November 2018.

Herlien Budiono, “*Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*”, *Majalah Renvoi Edisi*, 3 September 2005.

M. Syahrul Borman, “*Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Doktor Soetomo, Februari 2019.

Philipus M. Hadjon, “*Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*”, *Surabaya Post*, 31 Januari 2001.

Zulkarnain, F. A. “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Karena Ancaman Dan Pemalsuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 688 K/Pid/2006)*”, *Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

## **INTERNET**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI daring*, <https://kbbi/kemdikbud.go.id>, diakses pada 17 Mei 2025.

<https://lpnjogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/kemenkumham-jadi-3-kementerian-ini-strategi-sekjen-kemenkumham-untuk-transformasi>, diakses pada 06 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Banten, 2015.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 61 tahun 2006 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.